

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Kompetensi SDM**

Kompetensi SDM Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Furham, 1990 dalam Aruan, 2003 dalam Fikri *et al.*, 2015: 3). Menurut Aruan (2003) dalam Fikri *et al.* (2015: 8) Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang

yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sedangkan menurut Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga buah komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai. Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
2. Keterampilan-keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Di dalam melaksanakan tugasnya, selain memiliki pengetahuan cukup pegawai juga perlu memiliki keterampilan khusus. Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

3. Perilaku/Sikap Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas tugas yang telah diberikan.

#### 2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit. Menurut Nurillah (2014), pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola sebuah data termasuk memproses, mendapatkan,

menyusun, menyimpan, agar informasi yang dihasilkan menjadi berkualitas, serta informasi yang dihasilkan menjadi relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya.

### 2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2010) untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen perlu adanya suatu koordinasi sistem pengendalian internal yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran data tersebut.

Organisasi akan beroperasi secara efektif dan efisien ketika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik. Penyajian informasi keuangan informasi dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian intern dapat dicapai jika organisasi menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi (Herman, 2015: 22). Komponen-komponen COSO terdiri dari lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu (Janvrine, 2012: 22): (1) Lingkungan Pengendalian (Environment Control); (2) Penilaian Risiko (Risk Valuation); (3) Aktifitas Pengendalian (Activity Control); (4) Informasi

dan Komunikasi (Information and Communications); (5) Pemantauan (Monitoring).

Sedangkan menurut Rahardjo (2013) mengemukakan bahwa sistem pengendalian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Administratif. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

#### 2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan” (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Menurut Rahmadani (2015) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat

digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2017) menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif, terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratnasari (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi sedangkan variabel dependennya yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Mataram dengan responden kepala dan staf bagian akuntansi keuangan dengan menggunakan survey kuesioner. Pengujian hipotesis yang dilakukan

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan.

Kemudian dalam penelitian Sasmita&Agustini (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD KotaMataram yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

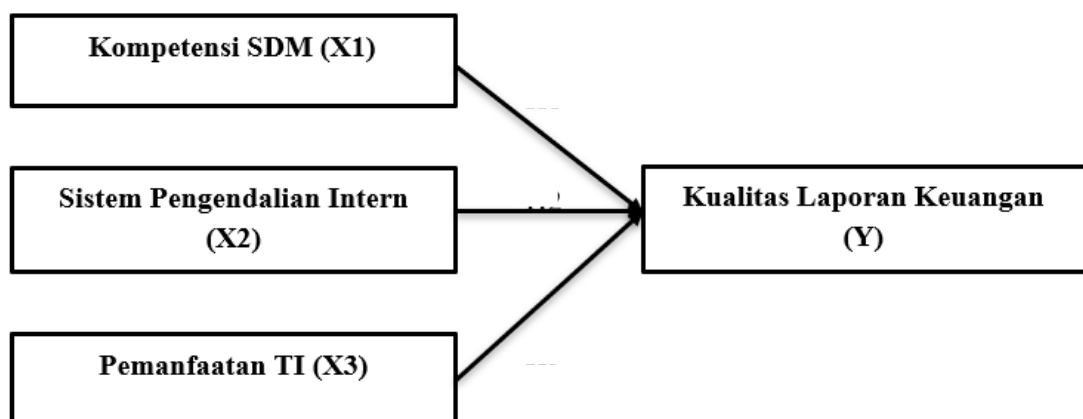
<b>Nama/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Rahma (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern	Analisis Statistik Deskriptif, Uji asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Koefisien Determinasi	Semua variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Ratnasari (2019)	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi	Analisis linier berganda	Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan, sedangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan
Sasmita & Agustini (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman Atas	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem	Analisis Linier Berganda	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman Atas



	Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Pengendalian Intern, dan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram		Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram
--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mencoba mencari kejelasan tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Mataram. Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.1 rerangka konseptual penelitian yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu dan atau suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Menurut Roviyanthi (2011) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal standar akuntansi yang diterapkan. Sehingga itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Bastian juga menjelaskan (138;2010) SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Dari uraian di atas masih adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu, sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

**H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan**

### **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Organisasi akan beroperasi secara efektif dan efisien ketika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik. Penyajian informasi keuangan informasi dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian intern dapat dicapai jika organisasi menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi (Herman, 2015). Komponen-komponen COSO terdiri dari lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu (Janvrine, 2012): (1) Lingkungan Pengendalian (Environment Control); (2) Penilaian Risiko (Risk Valuation); (3) Aktifitas Pengendalian (Activity Control); (4) Informasi dan Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan kondisi yang dapat diamati dilapangan serta jawaban responden terhadap item pertanyaan kue-

sioner terkait pemanfaatan teknologi informasi, setiap unit kerja. Dari uraian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan**

### 2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan an memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa, untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik (Indriasari, 2008).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan

keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Ketidak konsistenan hasil penelitian ini menyebabkan peran variabel pemanfaatan teknologi perlu diteliti kembali. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

**H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan**

